



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 6
TAHUN : 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2024



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
24. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02);
25. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 Nomor 9);
26. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2024 Nomor 3);
28. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
Dan
LURAH PANJANGREJO
MEMUTUSKAN;
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	5.276.210.793,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	5.483.296.437,00
Surplus /(Defisit)	Rp	(207.085.644,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	207.085.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan	Rp	207.085.644,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Panjanglejo.

Ditetapkan di : PANJANGREJO

Pada tanggal : 23 Desember 2024

LURAH PANJANGREJO,



MUDYANA

Diundangkan di : PANJANGREJO

Pada tanggal : 23 Desember 2024

CARIK PANJANGREJO,



IRIANTO

(Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2024 Nomor 6)

No. Registrasi Peraturan Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul (6/Panjanglejo/2024)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	227.821.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.038.389.293,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.276.210.793,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.416.351.739,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.894.429.856,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.351.360,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	63.351.360,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	902.190.360,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	902.190.360,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.584.000,00	PAD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	25.584.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	127.065.976,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.065.976,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	98.982.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	98.982.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.030.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.030.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.400.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	7.200.060,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	7.200.060,00	
	1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	7.155.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	7.155.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	123.371.900,00	PBH
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	123.371.900,00	
	1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	28.908.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	28.908.000,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	63.020.000,00	PBH
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	63.020.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	214.771.200,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	214.771.200,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	176.400.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	176.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	91.797.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	58.767.000,00	PAD, PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.767.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33.030.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.030.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	133.345.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18.407.500,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.407.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	83.560.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.560.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.270.000,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.270.000,00	
1.3.90		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	1.790.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
1.3.91		Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	16.317.500,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.317.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	182.623.068,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	29.800.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	11.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.845.000,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.845.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.915.000,00	DDS, PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.915.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.210.568,00	PAD
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	5.210.568,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.330.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.330.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	60.272.500,00	DDS, PAD, PBH, I
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.272.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	26.450.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.450.000,00	
1.4.96		Biaya Operasional Padukuhan	8.800.000,00	DDS, PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	114.156.815,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	96.929.315,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.929.315,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	17.227.500,00	PBP
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.227.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.913.431.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	162.922.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	26.353.000,00	PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.353.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	97.394.500,00	PBK
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.787.500,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	95.607.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.575.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	534.099.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	85.000.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	70.249.000,00	PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.249.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	259.854.500,00	PBK
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.854.500,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	5.550.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	94.543.000,00	DDS, PBK, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.543.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	7.153.000,00	DDS, PBK
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.153.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	5.750.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.235.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	60.000.000,00	PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.638.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	58.362.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	74.515.000,00	DDS, PAD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.057.900,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	73.457.100,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	545.720.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.012.300,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	535.707.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.311.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	101.311.500,00	DDS, PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.085.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	94.226.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	351.794.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	24.105.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.105.000,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	10.450.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	174.948.000,00	PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.948.000,00	
2.5.93		Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	142.291.000,00	PBK
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.291.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	64.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	4.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	PBK
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.464.000,00	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	58.536.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	19.068.500,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	19.068.500,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.258.500,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	810.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>542.123.498,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	76.625.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	54.100.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	22.525.000,00	DDS, PAD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.525.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	144.150.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	47.800.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	11.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	32.800.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	52.550.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	255.497.500,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	30.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	214.037.500,00	DDS, PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.102.500,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	197.935.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.460.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	65.850.998,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.110.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.110.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	41.316.200,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.316.200,00	
3.4.94		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	16.424.798,00	DLL, PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.424.798,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>436.590.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	320.836.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	17.525.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.525.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.150.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	209.161.500,00	DDS, DLL, PBK
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.909.500,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	204.252.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	70.000.000,00	DDS, PAD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.129.700,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.129.700,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.129.700,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.379.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.479.000,00	DDS, PBK
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.479.000,00	
4.4.94		Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja /Keluarga	3.900.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	57.660.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	49.280.000,00	PBK
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.280.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.380.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.645.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.645.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.645.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	PBK
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.940.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8.940.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	5.040.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>174.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.90		BLT DD	154.800.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	5.483.296.437,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(207.085.644,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	207.085.644,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	207.085.644,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGLEMBU, 23 December 2024

KEPALA DESA

MUDIYANA